



## BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Agar Kabupaten/Kota se-DIY Patuh Pembayaran Iuran

**YOGYA, TRIBUN** - Penguatan ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus digalakkan BPJS Kesehatan. Koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah menjadi kunci agar penyelenggaraan Program JKN kian optimal, baik dari segi peningkatan mutu layanan maupun kepatuhan pembayaran iuran.

Beragam langkah strategis dirumuskan agar Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini semakin dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Di antaranya, adalah dukungan penganggaran pemerintah daerah untuk kesinambungan Program JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara dalam kepastian jaminan kesehatan. Komitmen penganggaran terus dikuatkan," kata Deputy Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga dalam Kegiatan Kelas Konsultasi dan Awarding Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam

Program Jaminan Kesehatan Nasional wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6).

Dia menjelaskan, pemerintah daerah merupakan pemangku kepentingan strategis yang diharapkan mampu memperkuat komitmennya sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan Program JKN.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memastikan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar aktif dalam Program JKN. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pendaftaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga tambahan termasuk penyelesaian tunggakan iuran akibat alih segmen.

"Hal ini penting sebagai bentuk kehadiran dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja tetapi juga memperhatikan kalangan ASN dan anggota keluarga termasuk keluarga tambahan," ujarnya.



**APRESIASI** - BPJS Kesehatan saat menyerahkan apresiasi atas kepatuhan pembayaran iuran Program JKN 2025 bagi kabupaten/kota di DIY di Hotel De Djokja Malioboro, Kamis (25/6).

Asri menyampaikan, per 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.723.151 jiwa dari total jumlah penduduk 3.762.541 jiwa atau sebesar 98,95 persen, dengan tingkat keaktifan sebesar 90,81 persen. Capaian ini mengantarkan seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogya-

karta berhasil meraih cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 80 persen.

"Kami sampaikan apresiasi tertinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupa-

ten/Kota yang telah berkomitmen tinggi memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada warganya. Semoga komitmen ini terus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta semakin sehat dan sejahtera," kata Asri.

Dia mengatakan, dengan cakupan kepesertaan yang terus bertumbuh, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang mumpuni. Saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan 392 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 75 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi untuk memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN. Salah satunya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu identitas resmi peserta JKN untuk berobat.

"Bagi peserta JKN yang menunggak iuran lebih dari tiga bulan, kami mempunyai Program REHAB (Rencana Pembayaran

Bertahap). Program ini bisa dimanfaatkan untuk melunasi tunggakan iuran dengan cara mencicil sesuai kemampuan sehingga kepesertaannya bisa aktif kembali dan dapat mengakses layanan kesehatan dengan lancar tanpa kendala," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan berkesempatan memberikan apresiasi/penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah atas kontribusinya dalam penyelenggaraan Program JKN. Penghargaan juga diberikan kepada tiga terbaik kategori Penerimaan Iuran PBPB/Minumnggak Alih Segmen ke PPU Penyelenggara Negara yakni Pemerintah Kota Yogyakarta (terbaik I), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (terbaik II) dan Pemerintah Kabupaten Bantul (terbaik III).

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ni Made Dwipanti Indrayanti didampingi Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, Deputy Direksi Wilayah VI, Rahmad Asri Ritonga, dan masing-masing kepala cabang. **(mur/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005